



# PEMBELAJARAN INISIATIF KOTA PINTAR

Kajian Praktik Tata Kelola Pintar  
di Kota Amsterdam dan beberapa  
Kota di Indonesia



Kurnia Cahyaningrum Effendi,  
Dewi Sekar Kencono,  
Melda Fadiyah Hidayat



## Penyunting

Bima Katangga

## Penanggung Jawab

Yuyun Purbokusumo, PhD

## Penata Grafis

Wahyu Budi Utomo

### Diterbitkan oleh:

#### Institute of Governance and Public Affairs

Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada

Dan

#### IGPA Press

Magister Administrasi Publik, DMKP Fisipol UGM  
Jalan Prof DR Sardjito, Sekip, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota  
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos: 55223

No.Telp. : +62 813 9135 5393

Website : [igpa.map.ugm.ac.id](http://igpa.map.ugm.ac.id)

Instagram : [igpa.mapfisipolugm](https://www.instagram.com/igpa.mapfisipolugm)

Email : [igpa@ugm.ac.id](mailto:igpa@ugm.ac.id)

Dipersilahkan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buletin ini untuk tujuan pendidikan, namun tidak untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, penyebaran gagasan, dan advokasi diperkenankan.

# Pembelajaran Inisiatif Kota Pintar: Kajian Praktik Tata Kelola Pintar di Kota Amsterdam dan Beberapa Kota di Indonesia

**Kurnia Cahyaningrum Effendi**

*kurniaeffendi@ugm.ac.id*

Master of Public Policy and Administration,  
Departement of Public Policy and Management,  
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

**Dewi Sekar Kencono**

*dewi.sekar.kencono@mail.ugm.ac.id*

Doctoral student of Public Administration,  
Departement of Public Policy and Management,  
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

**Melda Fadiyah Hidayat**

*meldahidayat@unesa.ac.id*

Public Administration,  
Departement of Public Administration,  
Surabaya State University



## Abstract

*The aims of this paper is to increase understanding of smart cities that have occurred in several cities in Indonesia and around the world. Discussions and debates about smart city development, particularly smart governance, are presented conceptually as well as empirically. Furthermore, through Amsterdam Smart City, this paper examines the complexity of governance, including interaction and collaboration among various stakeholders in the decision-making process, the role of leadership and champions, the effectiveness of participation and partnerships, communication, data exchange, service and application integration, and the need for transparency and public accountability. Based on a thorough review of the selected articles, smart governance appears to be of high quality in the City of Amsterdam, but there are still some issues with stakeholder accountability, political accountability, and procedural inclusion in decision-making. Meanwhile, governance implementation in Indonesia is thought to be very different from that observed in Amsterdam. Furthermore, Indonesian cities that implement smart cities often have poor governance. The smart governance experience in Amsterdam provides substantive learning that can be applied to Indonesian smart governance.*

*However, the use of social inclusion indicators in developing countries can be skewed because the decentralization policy system, regional autonomy, and national planning and development system prevalent in Indonesia result in each city having different smart city “characteristics,” affecting the development of smart governance.*

**Key words:** *smart governance, smart city, development, scientific repertoire*

## Pengantar

Pembangunan perkotaan merupakan salah satu tantangan utama perkembangan masyarakat pada masa sekarang dan masa depan. Pada tahun 2018, populasi dunia sebesar 55,3 persen tinggal bermukim di wilayah perkotaan dan diproyeksikan daerah perkotaan menampung 60 persen orang secara global pada tahun 2030 (UN, 2018). Tren yang paling nyata adalah terjadi urbanisasi dalam skala yang massif, sehingga pertanyaan utama yang terkait dengan proses urbanisasi ini adalah bagaimana mengaturnya dan menyediakan kondisi kehidupan di kota-kota yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat bagi penduduknya untuk saat ini serta bagi pendatang baru dan generasi

masa depan. Ini mencakup penyebaran dan pembagian sumber daya secara merata dan efektif. Untuk memastikan kualitas kehidupan yang dapat diakses bagi seluruh penduduk kota dalam lingkungan perkotaan yang tangguh. Sederhananya, kota menghadapi tekanan agar dapat memberikan layanan berkualitas lebih baik, mempromosikan daya saing ekonomi lokal, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan efektivitas dan produktivitas dan mengatasi kemacetan dan isu yang berkaitan dengan lingkungan.

Pada saat yang sama, kota adalah tempat inovasi terjadi dan tempat orang dari berbagai latar belakang dan pengalaman berkumpul, membawa kapasitas dan keterampilan untuk menghasilkan ide-ide untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kota-kota di seluruh dunia mulai mengembangkan berbagai jenis model strategi yang mengandalkan penggunaan teknologi digital. Model strategi ini beragam—seperti kota digital, kota pintar atau kota ramah lingkungan—bergantung pada konteks kota, visi pembangunan kota dan cara teknologi digital mendukung kota yang dipilih. Terlepas dari model pembangunan perkotaan yang diadopsi, bagaimanapun, perencanaan kota juga harus mengatasi masalah inklusi sosial, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, menggunakan kebijakan publik dalam memastikan keberlanjutan, dan memanfaatkan teknologi digital dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana tersebut. Sementara itu, tata kelola kota berkembang menjadi kajian bidang akademis yang matang (Pierre, 1999, 2011) tetapi, baru-baru ini, disiplin ini dihubungkan dengan disiplin ilmu yang berfokus pada teknologi dan inovasi. Studi e-government dan inovasi misalnya dihubungkan dengan tata kelola perkotaan untuk mengembangkan pendekatan yang dapat membuat kota lebih pintar (Nam & Pardo, 2011a).

Kota dapat menggunakan IT dalam proses tata kelola untuk memahami dan menciptakan cara-cara cerdas untuk mengatasi tuntutan sektor publik dan swasta. Dalam upaya untuk menjadi kota

yang cerdas, fenomena ini menandai pertemuan dua tren: revolusi digital dan proses urbanisasi (Chourabi et al., 2012). Caragliu et al (2011) mendefinisikan *smart city* (selanjutnya untuk menyebut kota cerdas maupun kota pintar) sebagai sebuah kota “ketika terdapat investasi dalam modal manusia dan sosial dan infrastruktur komunikasi tradisional (transportasi) dan modern (Teknologi Informasi Komunikasi, TIK) yang memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi, dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, melalui tata kelola partisipatif.” Sementara Giffinger, et al (2007) merujuk *smart city* sebagai kemampuan pemerintah kota (daerah) untuk menerapkan fleksibilitas, transformabilitas, sinergi, dan individualitas. Sebaliknya, (Chourabi et al., 2012). berpendapat bahwa efektivitas kota “pintar” adalah cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang cepat di kota. Tentu, definisi untuk *smart city* masih banyak yang berbeda-beda, sehingga definisi belum mengarah pada suatu yang universal. Sampai saat ini, konsep *smart city* masih terus bermunculan, dan para pemangku kepentingan yang berbeda memiliki konseptualisasi berbeda tentang *smart city*.<sup>1</sup> Proyek kota pintar baru-baru ini jelas membahas berbagai aspek kota dan memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda untuk mencapainya. Namun demikian, konsep kota pintar harus menjadi inspirasi bagi perubahan kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Meijer dan Bolivar, 2016; Meijer et al., 2016; Van Winden

---

1 Para peneliti dan pembuat kebijakan mengukur kota cerdas dengan menggunakan *smart environment, smart mobility, smart economy, smart living, smart people* dan *smart governance* (Giffinger et al., 2007). Menurut Colldahl et al., (2013), dimensi kota cerdas meliputi: ekonomi cerdas yang berpusat dalam daya kompetisi kota secara keseluruhan dengan kemampuan fleksibilitas pasar tenaga kerja, semangat inovatif, semangat produktivitas; masyarakat cerdas mengatur sumber daya manusia dan interaksi sosial antar manusia melalui afinitas untuk belajar sepanjang hayat, partisipasi dalam kehidupan publik, kreativitas, dan fleksibilitas; dan pemerintah cerdas mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan melalui partisipasi.

et al., 2016). Untuk itu, Capdevila & Zarlenga (2015) dan Dumay (2016) menekankan bahwa inti dari kota pintar adalah kombinasi sumber daya manusia, modal sosial, dan informasi, dikombinasikan dengan infrastruktur teknologi komunikasi, untuk menghasilkan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan peningkatan ekonomi.

Keterlibatan berbagai aktor—seperti kemitraan publik-swasta dalam pembangunan perkotaan harus diusung dan dipastikan bahwa pihak-pihak yang belum pernah bekerja bersama akan dapat bekerja sama secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan orkestrasi ekosistem (perkotaan) yang dipilih sesuai dengan struktur ekosistem untuk menghadapi strategi independen dan kompleksitas proyek (*smart city*) secara tepat. Pemerintah kota dapat bertindak sebagai penyedia langsung yang memberikan layanan, mengelola *smart city* sebagai perusahaan dan memenuhi peran integrator untuk semua pihak. Pemerintah kota juga dapat bertindak sebagai penyedia layanan tidak langsung, hanya bertanggung jawab atas platform atau infrastruktur yang menghubungkan layanan dan kebutuhan warga negara (Visnjic, I., Neely, A., Cennamo, C., Visnjic, 2016). Pemerintah kota terus-menerus harus berurusan antara untuk memberikan layanan publik yang lebih baik atau berfungsi sebagai orkestrator dalam ekosistem dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Almirall, et al., 2016; Visnjic et al., 2016); Konsep kota pintar meminta pendekatan yang berfokus pada kolaborasi alih-alih kompetisi yang mana pendekatan ini lebih sulit untuk dikelola, sehingga peran tata kelola akan menjadi lebih penting dari sebelumnya (Anttiroiko et al., 2014)

Tulisan ini berusaha untuk menawarkan analisis pengalaman salah satu kota di dunia yang berhasil mengembangkan *smart city* di wilayahnya. Salah satunya adalah Kota Amsterdam yang dinilai Praharaj dan Hawken (2018) telah memenuhi kriteria *smart governance* kolaboratif yang ideal, yaitu memenuhi kriteria kolaborasi antara

pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk masyarakat inovasi dan kriteria transformasi pemerintahan tingkat tinggi. Apalagi Capra (2016) mencatat Kota Amsterdam memiliki jumlah pekerja berpendidikan yang besar (44% dari populasi berpendidikan tinggi), toleransi sosial, dan penetrasi digital yang tinggi, inovasi perkotaan dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi sumber daya manusia dan sosial (Capra (2016)). Namun, tentu di balik keberhasilan tersebut—masih ada banyak hal yang perlu dikaji berkaitan dengan dinamika *governance* itu sendiri. Lebih lanjut, tulisan ini merupakan kerja *desk study* dari beberapa sumber penelitian *smart governance* berfokus pada kajian Kota Amsterdam. Sementara untuk *smart governance* di Indonesia, peneliti mengelaborasi berbagai pengalaman di beberapa untuk menggambarkan dinamika *smart governance* dalam lensa riset yang sudah terpublikasi.<sup>2</sup>

## **Smart City dan Smart Governance**

Terlepas bahwa istilah *governance* atau *good governance* menjadi *booming* di negara berkembang ketika ia menjadi prakondisi terciptanya stabilitas perekonomian makro bagi sebuah Negara yang mendapatkan pinjaman dari Negara donor atau lembaga internasional (misal oleh UNDP, USAID, Bank Dunia) dan adanya pergeseran dari “*government*” ke “*governance*” dalam konteks globalisasi dan jejaring masyarakat sejak tahun 1970-an. Healey (1997) dan Kooiman (2009) mendefinisikan

---

2 Dalam beberapa tahun terakhir, riset tentang *smart city* di Indonesia beragam, dilihat dari tema strategis hingga kajian implementasi termasuk *scope* dan metodenya. Namun riset yang secara khusus berfokus pada *smart governance* belum banyak dan masih bersifat sporadis apabila dianalisis dari lokus penelitian. Hal ini juga menjadi dasar bahwa tulisan ini tidak memilih satu kota cerdas di Indonesia sebagai *case* untuk diperbandingkan dengan Amsterdam. Selain itu, dalam pemilihan artikel, konten “*smart governance*” diutamakan ketimbang “*smart government*” atau e-government.

tata kelola pemerintahan adalah seperangkat interaksi sosial-politik antara pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan upaya pemerintah untuk memenuhi kemaslahatan tersebut. Tata kelola pemerintahan mencakup mekanisme, proses, dan lembaga yang digunakan warga negara untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, menengahi perbedaan mereka, dan menjalankan hak dan kewajiban hukum mereka, termasuk mengelola sumber daya publik dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terpenuhi. Secara sederhana, *governance* dapat diartikan interaksi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan melalui ranah proses pengambilan keputusan (Garcia Alonso & Lippez-De Castro, 2016), yang mencerminkan keinginan untuk mencapai solusi bersama melalui kerja sama di antara mereka (Stoker, 1998). Dalam perkembangannya, *governance* digunakan dalam berbagai konteks, tetapi umumnya merujuk pada semua bentuk koordinasi sosial dan pola aturan (Bevir, 2012).

Konsep "*governance*" atau pemerintahan bukanlah "memerintah" ataupun bentuk yang lebih rendah dari memerintah. Ini adalah konsep hibrida yang, menurut Brown (2015) sering digunakan secara bergantian dengan 'pemerintahan' dan 'pengelolaan'[...] pertukaran dan percampuran ini menunjukkan bahwa pemerintahan terdiri atas perpaduan penting antara praktik politik dan bisnis baik di tingkat administrasi maupun di tingkat penyediaan barang dan jasa. Namun apabila dikaitkan dengan *smart governance* yang merupakan salah satu indikator atau dimensi *smart city*, maka *smart governance* mengacu pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, transparansi tata kelola, layanan publik dan sosial, dan strategi dan perspektif politik (Giffinger et al., 2007).

Merujuk *smart governance* dalam konteks *smart city*, definisi *smart governance* juga belum mencapai kesepakatan yang universal. Definisi pertama ditawarkan oleh Chourabi et al., 2012a, yaitu pemerintahan

pintar didefinisikan sebagai tata kelola yang didasarkan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menggabungkan berbagai sumber daya, individu, kebijakan, praktik, teknologi, norma sosial, dan informasi yang berinteraksi untuk mendukung kegiatan pemerintahan kota. Sementara Pereira et al. (2017) mencatat, terjadi peningkatan pengaruh TIK pada tata kota di bidang manajemen dan layanan pemerintah, partisipasi kepentingan dan partisipasi warga negara. Sementara Meijer dan Bolivar (2016), mendefinisikan *smart governance* sebagai “proses kompleks dari perubahan institusional dan mengakui sifat politis dari visi yang menarik atas sosial-teknis tata kelola.” Selain itu, Meijer dan Bolivar (2016) membedakan peta *smart governance* menjadi: pertama *smart city* berorientasi pada teknologi;<sup>3</sup> kedua, *smart city* berfokus pada sumber daya manusia;<sup>4</sup> ketiga *smart city* lebih berfokus dalam konsep penataan tata kelola pemerintahannya;<sup>5</sup> dan yang keempat adalah kolaborasi dari ketiga orientasi kota pintar, yang dikenal sebagai *smart urban collaboration*.<sup>6</sup> Merujuk pada *smart governance*

---

3 Konsep *smart city* yang menekankan teknologi memperlihatkan bahwa komponen yang paling utama adalah TIK, dalam artian bahwa TIK dapat digunakan sebagai metode penyelesaian permasalahan kota di bidang sosial

4 Konsep kedua tentang *smart city* yang menekankan sumber daya manusia memperlihatkan bahwa komponen ini dapat memberikan dampak terhadap karakteristik kota tersebut. Artinya, semakin tinggi kuantitas orang yang berpendidikan tinggi yang tinggal di sebuah kota, semakin besar kemungkinan bahwa kota tersebut akan termasuk dalam kategori *smart city* karena “orang pintar” yang menggerakkan kota untuk menjadi kota yang berkualitas hidup tinggi.

5 Ketiga, *smart city* berfokus pada tata kelola pemerintahan. Ini menekankan hubungan antara masyarakat kota dan pemerintah. Diharapkan konektivitas ini dapat mendorong inovasi dalam kebijakan pelayanan yang terjadi di kota tersebut.

6 Selain ketiga gagasan yang dikenal sebagai “*smart city*”, ditemukan bahwa *smart city* juga dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari ketiga elemen, yaitu *smart urban collaboration*. *Smart city* bukan hanya merupakan bagian dari sebuah kota yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan dan menyelesaikan masalah sosial, tetapi juga merupakan kombinasi dari *smart people* dan *smart governance*. Tujuannya adalah untuk mencapai *smart economy, smart living, smart mobility, smart environment, dan smart environment*.

dalam manajemen dan layanan pemerintah berarti juga melibatkan partisipasi warga negara dan kolaborasi pemangku kepentingan terkait. Bolivar dan Meijer (2016) juga mengidentifikasi beberapa elemen kunci *smart governance* termasuk penggunaan TIK, kolaborasi eksternal dan partisipasi, koordinasi internasional, administrasi elektronik, dan hasil (*outcomes*) yang jika dibagi secara garis besar dibedakan menjadi tiga dimensi, yaitu strategi untuk menerapkan *smart governance*, pengaturan *smart governance* dan hasil-hasil *smart governance*. Sementara, Chourabi et al (2012) merangkum faktor atau prinsip *smart governance* meliputi: champion dan kepemimpinan, komunikasi, akuntabilitas dan transparansi, pertukaran data, kolaborasi, serta integrasi layanan dan aplikasi. Selain itu, temuan dalam penelitian *Smart Cities initiatives* juga mengikuti prinsip-prinsip yang sama dari model *governance* yang diprakarsai penelitian *e-government* seperti bersikap terbuka, bertanggung jawab, kolaboratif dan partisipatif (Alawadhi & Scholl, 2016; Alawadhi et al., 2012; AlAwadhi & Scholl, 2013; Chourabi et al., 2012; Nam & Pardo, 2011b)

Studi terbaru Tomor et al (2019) tentang *smart governance* menggunakan *Systematic Literature Review* menunjukkan kondisi kontekstual tata kelola pemerintahan yang baik sebagai hal yang sangat penting untuk memahami hasil yang beragam yang tampak pada Tabel 1 Dampak yang diantisipasi dari konteks tata kelola pemerintahan yang cerdas di bawah ini:

**Tabel 1: Pengaruh yang Diantisipasi oleh Konteks *Smart Governance***

Faktor Konteks		Harapan
Domain Kebijakan	Tingkat urgensi	Urgensi topik dalam domain kebijakan menghasilkan komitmen pemerintah dan warga negara terhadap tata kelola pemerintahan yang cerdas
	Kompleksitas masalah	Kompleksitas masalah memiliki dampak negatif terhadap keterlibatan warga yang didukung TIK Keterlibatan warga negara dan kolaborasi publik-sipil
Kepercayaan	Kepercayaan dalam masyarakat	Tingkat kepercayaan warga yang tinggi maupun rendah terhadap solusi kebijakan pemerintah dapat memulai keterlibatan warga yang didukung oleh teknologi.  Kepercayaan terhadap keadilan prosedural pemerintah diperlukan dalam fase kelanjutan kolaborasi cerdas.
Lingkungan Kelembagaan dan Politik	Kekuatan demokrasi	Demokrasi yang lebih kuat menghasilkan lebih banyak keterlibatan warga negara yang dimungkinkan oleh TIK dan kolaborasi publik-sipil.
	Warisan politik	Masa lalu yang otoriter berhubungan negatif dengan keterlibatan warga negara dan kolaborasi publik-sipil yang didukung oleh teknologi digital.
	Budaya administratif	Gaya administrasi yang lebih formal dan hirarkis menghasilkan lebih sedikit keterlibatan warga negara yang dimungkinkan oleh TIK.  Administrasi publik dan pemerintahan yang terpusat secara nasional menyebabkan rendahnya tingkat kolaborasi yang didukung teknologi antara warga negara/ masyarakat dan pemerintah daerah.
	Lingkungan politik dan bisnis yang inovatif dan progresif	Lingkungan politik dan ekonomi dengan atmosfer yang inovatif dan progresif akan menyuburkan inovasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, partisipasi warga negara yang berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang cerdas.

Jangkauan dan Penggunaan Internet	Penetrasi Internet	Intensitas dan tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari partisipasi yang difasilitasi TIK sangat terkait dengan negara-negara dengan penetrasi Internet yang luas dan dan kecakapan teknologi.
Karakteristik Sosio-Spasial	Kerentanan terhadap bencana	Kerentanan terhadap bencana dan kekuatan alam mengakibatkan - melalui kebutuhan masyarakat yang mendesak - tingginya komitmen pemerintah dan warga terhadap tata kelola pemerintahan yang cerdas.
	Kohesi social	Kohesi sosial dalam suatu wilayah berkorelasi positif dengan keterlibatan warga dalam pengaturan kota cerdas.

Sumber: Tomor et al (2019)

Dari berbagai kajian *smart governance*, Popova & Popovs (2023) mencatat tidak ada perbedaan antara hasil yang diantisipasi dan eksternalitas ketika menganalisis dampak dari hambatan yang ada saat ini melalui metodologi tinjauan sistematis tentang publikasi ilmiah tentang hasil, hambatan, dan fasilitator *smart governance*. Terdapat enam faktor yang diidentifikasi: Informasi, Efisiensi, *Citizen-Centricity*, Transparansi, Kesenjangan Digital, dan Regulasi. Lebih lanjut, Popova & Popovs (2023) menekankan para pembuat kebijakan, pihak berwenang, dan staf pendukung teknis dan teknologi harus mempertimbangkan kemungkinan hasil tak terduga dari tata kelola pemerintahan yang cerdas, baik yang positif maupun negatif. Masyarakat, pihak berwenang, dan pelaku usaha adalah pemangku kepentingan tata kelola pemerintahan yang baik, dan penting untuk memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan setiap orang. Selain itu, ada bidang-bidang yang dapat membahayakan pelaksanaan pemerintahan yang efektif. karena tidak ada literatur ilmiah yang cukup, atau bukti statistik yang memadai. Faktor-faktor ini berkorelasi satu sama lain. Efek atau eksternalitas yang sama dapat dihasilkan oleh berbagai

faktor, dan berbagai faktor dapat menyebabkan efek tersebut muncul di tempat yang berbeda. Selain itu, satu penghalang atau fasilitator memasuki proses sebagai penghalang atau fasilitator untuk hasil lain. Misalnya, pertumbuhan ekonomi mendorong pengembangan teknologi, yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik lainnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, literatur tidak membagi efek fasilitator dan penghalang dengan efek eksternal. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang cerdas akan selalu menghasilkan dampak, baik positif maupun negatif, yang harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang saat membuat keputusan.

## **Smart Governance Amsterdam**

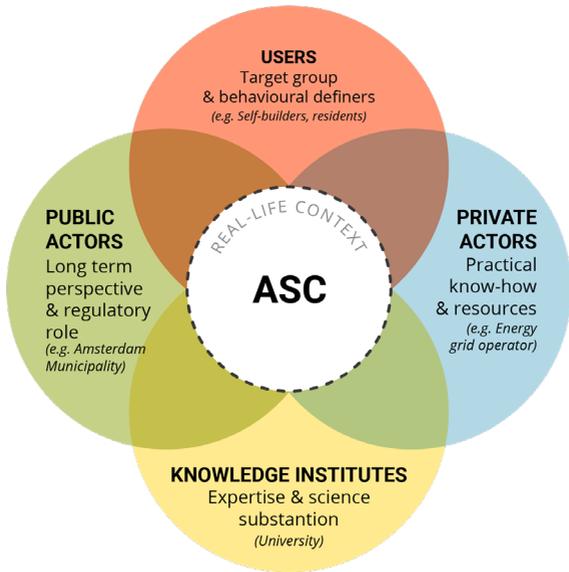
Untuk melihat dinamika *smart governance* di Amsterdam adalah dengan merujuk pada riset-riset Amsterdam *Smart City* (selanjutnya disebut ASC), sebab ASC memprioritaskan penduduk dan pengguna Capra (2016). Apabila dirunut, perkembangan *smart city* di Kota Amsterdam telah berjalan lebih dari 1 dekade lalu. Program Amsterdam *Smart city* didirikan pada tahun 2007 dengan tujuan mempromosikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan menstimulasi ekonomi kreatif melalui eksperimen solusi perkotaan yang inovatif (Noori, 2020). ASC mencakup bisnis, kelompok riset sosial (organisasi “jalan tengah” negara), lembaga pengetahuan, dan lembaga pemerintah daerah, yang berkolaborasi tingkat untuk mengembangkan proyek *smart city* di kota tersebut. Mulai dari 2013, Amsterdam Innovation Motor telah menjadi bagian dari Dewan Ekonomi Amsterdam (Amsterdam Economic Board, AEB).<sup>7</sup> Nesti & Graziano (2020) mencatat ada lebih dari

---

<sup>7</sup> Penting untuk dicatat bahwa, dalam analisis jaringan kolaborasi *smart city* Amsterdam, dua entitas telah digabung.

200 publik dan swasta, organisasi nirlaba dan nirlaba aktif di bidang digitalisasi, energi, ekonomi sirkuler, pendidikan, pemerintahan, inklusi sosial, dan keterlibatan public terlibat dalam 273 proyek yang terdaftar di ASCP. Saat ini pada tahun 2023 Dewan tata kelola ASC terdiri dari 28 mitra permanen, termasuk pemerintah daerah, perusahaan nirlaba, organisasi pemerintah, dan organisasi sosial (ASC, 2023), namun tidak termasuk organisasi masyarakat. Bagan 1 menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dalam proyek-proyek eksperimen perkotaan dan bermitra untuk meningkatkan keberhasilan ASC. Secara khusus, kota pintar dan ASC, keterlibatan dan pemerintah Kota Amsterdam ditunjukkan oleh Voorwinden (2022) yang mengkaji peran pemerintah kota Amsterdam dalam pengembangan kota pintar. Peran tradisional pemerintah Kota Amsterdam sebagai regulator menghadapi empat tantangan, yaitu: (1) berkolaborasi antar departemen pemerintah kota, (2) mengarahkan program kota pintar melalui jaringan publik-swasta, (3) menavigasi kekuatan kota pintar pemerintah kota, dan (4) bereksperimen dengan pengadaan barang dan jasa baru. Tantangan-tantangan ini memaksa pemerintah kota untuk membentuk departemen kota baru, mengembangkan instrumen hukum lunak, dan menggunakan pengadaan yang inovatif.

## Bagan 1: Overview of the Amsterdam *Smart city* (ASC)'s stakeholders



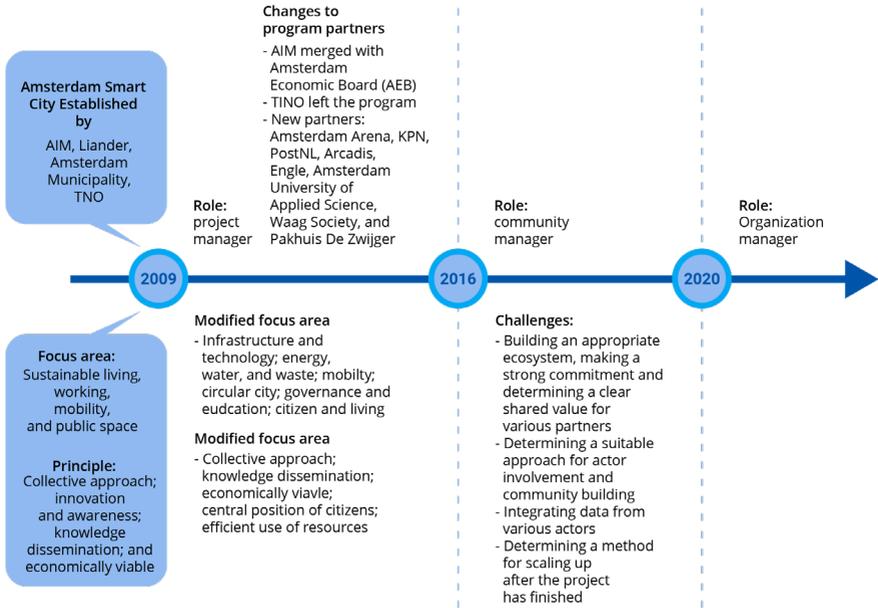
Sumber: AMS (2017) dalam Lee et al (2023)

Noori et al (2020) mencatat pendorong pertama Amsterdam bergerak menuju penerapan kebijakan *smart city* didasarkan pada hasil diskusi perubahan iklim. Ruang lingkup ASC diperluas mencakup daerah yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Amsterdam juga mengembangkan ekonomi sirkular dan visi struktural berkelanjutan yang mencitrakan bahwa Amsterdam pada Tahun 2040 merupakan penggerak data (*evidence*), kota kolaborasi, inovasi, serta *future-proof*. Lebih lanjut, seluruh stakeholder yang terlibat menyediakan sumber daya, informasi dan pengetahuan, keahlian, waktu, aset material, dan keuangan untuk membantu menghasilkan dan mengimplementasikan inisiatif cerdas secara bersama-sama—dengan kata lain teknologi membantu proses ini (Putra & van der Knaap, 2018). Sementara apabila dikaitkan dengan peran organisasi dalam konteks dan kematangan pengembangan kota pintar, Camboim et al (2022) menilai ASC telah

mengatasi persoalan legitimasi dan relevansi ekosistem dan bertindak lebih sebagai fasilitator dan co-produser, mendelegasikan perencanaan dan implementasi kepada pihak lain.

Arah strategi ASC berasal dari pendekatan *bottom-up*, yang menghubungkan pemangku kepentingan dengan tujuan mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide bersama dan solusi untuk kota. Apabila dilihat dalam perkembangannya, bagan 2 ASC *timeline*. Amsterdam *Smart city* yang menunjukkan progress baik actor, focus program kegiatan, prinsip dan tantangan (Putra & Van Der Knaap, 2019). Gagasan dan proposal proyek terkait dengan kota pintar dikirim dari organisasi lokal ke ASCP yang mengumpulkan, menemukan dan mengkoordinasikan mitra dan itu juga bertanggung jawab untuk penggalangan dana. Sementara fitur umum dari portal Amsterdam *Smart city* dirangkum Yoo (2021) menjadi total 10 kategori: partisipasi pemangku kepentingan, keragaman informasi, privasi dan keamanan, kolaborasi proyek, pemrosesan keluhan, informasi yang disesuaikan, informasi terkini informasi terkini, akurasi informasi, pendidikan dan pelatihan, start-up dan pekerjaan. Lebih lanjut, Yoo menilai Portal ASC telah memasukkan rencana partisipasi sebab di dalamnya terdapat iklan untuk menyebarkan teknologi baru dan dukungan untuk pendidikan/acara kelompok masyarakat: Menyediakan pendidikan dengan mengkategorikan berdasarkan usia, kelompok sosial, keahlian, topik yang diminati, maupun tingkat kesulitannya.

## Bagan 2: ASC Timeline. ASC, Amsterdam Smart City



Sumber: Putra & Van Der Knaap (2019)

Nesti (2020) mengidentifikasi *smart city governance* Amsterdam sebagai berikut: tujuan politik dari *smart city* adalah berkelanjutan, pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik; model kebijakan pragmatis; jenis pertukaran politik konsensual; *Public-private exchange* bersifat kolaboratif, *City-citizen relationship* bersifat inklusif; pejabat public merupakan kontingensi primer; instrument kunci menggunakan mekanisme *public and private partnership* sementara pola subordinasi menunjukkan positif serta kriteria kunci evaluatif, inovasi. Ini menunjukkan bahwa Amsterdam menekankan kolaborasi dengan perusahaan sangat didorong oleh elit administrasi (dan) politik sebab digunakan sebagai sarana memobilisasi sumber daya swasta dan meningkatkan ekonomi lokal. Dengan demikian, gaya kebijakan diadopsi oleh pemerintah sangat terasa pragmatis.

Platform ASC merupakan kemitraan publik-swasta yang berfungsi sebagai perantara dalam pembentukan ikatan jaringan sosial (Raven et al., 2019). Kolaborasi ini—yang juga diberi label Kemitraan Publik dalam bentuk Urban Living Labs (ULLs) untuk memanfaatkan budaya teknologi dan mempromosikan pembelajaran dan kreasi bersama (Mancebo, 2020). Persoalannya, meskipun warga secara aktif terlibat dalam proyek desain bersama dan implementasinya tetapi mereka biasanya tidak berpartisipasi dalam proses *governance* atau dalam mendefinisikan keseluruhan strategi *smart city*. Temuan ini seperti yang dikaji oleh Winden et al (2016), maupun Nesti & Graziano (2020) bahwa partisipasi dengan pendekatan *bottom-up* ASC secara inheren lebih melibatkan berbagai mitra termasuk warganya. Kedua kajian tersebut menilai bahwa warga negara secara substansi masih tidak dianggap sebagai pemain sentral dan jarang menjadi bagian resmi dari pemain kemitraan; Keterlibatan warga hanya dapat dilakukan melalui platform online dalam tahap implementasi strategi *smart city*—yang mana bentuk partisipasi ini biasanya terbatas pada desain bersama dan untuk menguji produk atau layanan.

Platform ASC memfasilitasi aksi-aksi yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur dan teknologi untuk energi, air, pengelolaan limbah, transportasi, standar hidup warga, dan pendidikan. Terdapat banyak pilot proyek yang dikembangkan, pertama, Mancebo (2020) mencatat dua diantaranya proyek perkotaan dengan nama Inisiatif Groene Leven Lab dan Hackable City, yang mana setelah pembangunan laboratorium hidup berdiri dan meskipun anggota masyarakat diajak berkonsultasi, namun mereka sedikit terlibat. Hal ini dikarenakan pilot proyek ini terletak di daerah kumuh yang sedang mengalami revitalisasi kota, dan penciptanya bukan penduduk daerah tersebut. Mancebo (2020) kemudian mengingatkan aplikasi dan teknologi *smart city* yang awalnya secara resmi menjanjikan masyarakat yang lebih partisipatif, para penduduknya telah menjadi pengguna atau

klien dari sebuah kota yang tidak lagi menjadi milik mereka. Kedua, Schrammeijer et al. (2021) berfokus pada aplikasi *Verbeterdebuurt*, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai *'Perbaiki Lingkungan Sekitar'*, menawarkan kepada warga Amsterdam sebuah saluran yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan mengajukan saran untuk perubahan. Namun dalam penelitiannya, temuan Schrammeijer et al. (2021) menunjukkan bahwa nilai-nilai subjektif dan kelompok pengguna tertentu akan terabaikan dalam perencanaan kota pintar jika langkah-langkah yang digunakan tidak memadai.

Ketiga, penelitian Mello Rose et al. (2022) yang berfokus pada keterlibatan masyarakat sipil dalam ASC menunjukkan bahwa norma-norma kelembagaan mendukung aktor masyarakat sipil yang berorientasi sosial. Namun, dinamika relasional lebih mendukung masyarakat sipil yang berorientasi ekonomi daripada masyarakat sipil yang berorientasi sosial dalam kolaborasi proyek ekologi. Bahkan di Amsterdam, aktor masyarakat sipil yang seharusnya inklusif, berorientasi politik, sosial, dan sipil, justru kurang melakukan kolaborasi antar organisasi. Hal ini memperjelas apa yang menjadi temuan Rose (2022) bahwa dalam konteks Partisipasi pemangku kepentingan masyarakat sipil (*Civil Society Stakeholders* atau CSS) dalam ASC lebih banyak dibatasi oleh domain tematik dominan dan konstelasi pemangku kepentingan berfokus pada ekonomi dibanding sosial.

Keempat, dalam koridor politik, politisi yang terpilih di Amsterdam, pada kenyataannya, secara langsung terlibat dalam mengatur jaringan pemerintahan kota mendelegasikan fungsi otoritas kepada pejabat publik. Partisipasi otoritas publik dalam *smart governance* di Amsterdam adalah para politisi berbagi peran koordinasi ini dengan aktor-aktor lain khususnya dalam fase desain jaringan dan pembersihan jaringan. Namun oleh Nesti & Graziano (2020), persoalan ini juga dikaitkan dengan "suara" yang seharusnya merujuk pada cara dan bagaimana masyarakat berpartisipasi secara aktif dan positif

dalam proses pembuatan keputusan yang konkret dalam jejaring *smart governance*, yang ternyata “suara” diberikan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan dan terpengaruh tetapi tidak untuk warga negara yang umumnya dikecualikan dari proses pengambilan keputusan.

Sementara Jameson et al. (2019) memperlihatkan dari sisi yang lebih rentan—yaitu masyarakat yang mana dalam proses *governance*, masyarakat pasti sangat tidak senang tentang bagaimana data yang baru diproduksi dan diintegrasikan untuk tata kelola kota dan sektor profit. Tentu ada kenyataan bahwa terdapat data ganda yang merupakan produk sampingan, seperti ketika orang menggunakan aplikasi—katakanlah, peta atau untuk mencari jadwal bus—yang ditujukan untuk layanan tertentu tetapi bukan untuk menyediakan data yang bisa diakses siapa saja. Persoalan ini sangat jarang dipublikasikan sebab tertutupi klaim efisiensi dan inovasi dari Kota Amsterdam. *Smart governance* yang dikawal belum efektif melayani sistem klasifikasi basis data tanpa diskriminasi, dan risiko pengawasan skala besar yang menimbulkan biaya kehilangan privasi baik individu dan kelompok.

Belakangan ini apabila dilakukan perbandingan dalam pelaksanaan kota cerdas lainnya, kajian Demirel & Mülazimoğlu (2022) membandingkan empat kota yaitu Amsterdam, Barcelona, Kocaeli dan Ankara menunjukkan Kota Amsterdam mendapat nilai “*strong*” pada dimensi partisipasi warga dan kerja sama antar pemangku kepentingan, dimensi Administrasi yang cerdas maupun dimensi Mekanisme tata kelola. Sementara kajian Jiang et al. (2023) tentang perbandingan kota cerdas Hangzhou (China), Singapore dan Amsterdam menyimpulkan ASC merupakan sebuah mekanisme yang berorientasi pada solusi berbasis platform dan dicirikan oleh pendekatan yang berpikiran terbuka, dengan tujuan untuk meningkatkan kelayakan huni dan kemakmuran ekonomi Amsterdam.

## Penerapan *Smart Governance* di Kota-Kota Indonesia

Perkembangan *Smart governance* tidak terlepas dari praktik *smart city* di Indonesia. Inisiasi pertama kali konsep *smart city* sebenarnya sudah lama dikembangkan pada tahun 2003. Rosandya (2017) mencatat dinamika pengembangan *smart city* melalui kebijakan Kementerian komunikasi dan informasi seperti rating perkembangan *smart city* 2015. Dua tahun kemudian, tepatnya 2017, Kementerian komunikasi dan Informasi *launching* "100 Smart Cities". Melalui "100 *smart city*" tersebut, setidaknya pemerintah Indonesia telah mendampingi berbagai kota/kabupaten menuju seratus kota *smart city*. Melalui pendampingan tersebut, konsep *smart city* di Indonesia memiliki perbedaan dengan negara lainnya. Terdapat kegiatan survey Riset Rating Kota Cerdas Indonesia yang menunjukkan setiap kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki definisi real konsep *smart city* apabila dibandingkan dengan Singapura terutama pada tingkat pendidikan dan ruang (Pratama, 2022). Terbukti dengan sumber daya manusia yang lebih disiplin di Singapura dan juga hal tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya. Selain itu, berbagai penelitian terpilih untuk menggambarkan dinamika perkembangan dari konsep *smart governance*.

Jakarta adalah salah satu kota pintar pertama di Indonesia. Secara khusus Kurnia (2020) mencatat Jakarta *Smart City* (selanjutnya JSC)—kelembagaan *smart city* yang dikawal Pemerintah DKI Jakarta—menerapkan tata kelola pemerintahan yang cerdas. Tata kelola dalam pelayanan publik secara holistic melalui Peta jalan dan rencana induk 2014-2015 sebagai panduan implementasi, bentuk produknya mencakup layanan.<sup>8</sup> Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa

---

8 Produk layanan dalam rencana induk Provinsi DKI Jakarta yang di implementasikan antara lain : 1. CROP 2. Qlue. 3. Portal yang digunakan untuk keterbukaan informasi 4. Informasi terkait kebun binatang Ragunan 5. Kanal Pengaduan 6. API (Application

inovasi untuk mempercepat implementasi program rencana induk. percepatan implementasi tersebut antara lain: 1) Membedakan konsep *smart city* dengan konsep yang hampir sama yaitu *e-government*; 2) Kolaborasi yang tercipta antara pengelola kota pintar, pihak swasta, serta akademisi; 3) Pengelolaan dana CSR milik perusahaan swasta; 4) Media sosial sebagai pusat promosi. Namun, ada beberapa tantangan dalam implementasi JSC, antara lain perbandingan rendahnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh permasalahan politik di pusat kota, Jakarta. Menurut penelitian Syalianda & Kusumastuti (2021), Jakarta memiliki platform *smart city* satu pintu yang digunakan untuk mendigitalisasikan data pemerintah dan membagikan informasi kepada publik. Namun, platform ini kurang merepresentasikan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Terlihat bahwa hanya sekitar 11,85% orang yang menggunakan platform membuktikan partisipasi masyarakat masih rendah dalam penerapan *smart city* ini.

Dalam perkembangan JSC sejak 2015, Firmansyah et al. (2022) mencatat harapan baru untuk menciptakan *sound governance* di DKI Jakarta. melalui JSCLab, yang didirikan pada tahun 2020 memiliki enam program: JSCSandbox, JSCInternship, JSCTalks, Research Group, Future City Hackathon. Jakarta *Smart city* (JSC) diciptakan untuk memaksimalkan pelayanan publik di Jakarta dengan mengoptimalkan teknologi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan sumber daya secara lebih efisien. Konsep *Smart city* masih dalam tahap pengembangan, sehingga pemerintah secara bertahap akan mensosialisasikannya untuk meningkatkan infrastruktur dan mengedukasi aparaturnya.

---

Programing Interface) 7. CRM 8. Pantau Banjir 9. Musyawarah perencanaan pembangunan yang berbasis elektronik 10. Nodeflux. Empat aplikasi *smart governance* JSC yang terkenal dapat membantu warga Jakarta untuk mendapatkan informasi yang transparan tentang pemerintahan dan menyampaikan keluhan. E-budgeting, CRM/QLUE, PTSP, dan JAKI adalah empat aplikasi tersebut.

Sementara kajian terbaru, Purba dan Jayadi (2023) juga mengkaji esensi *smart governance* dalam JSC, dan menemukan empat dari dua puluh responden tidak pernah mendengar atau menggunakan program JSC untuk tata kelola pemerintahan yang cerdas. Yang lainnya telah menggunakan PTSP, CRM (Cepat Respon Masalah/Qlue, dan JAKI. Sementara data wawancara dengan staf JSC, data aplikasi-aplikasi tersebut disimpan di database vendor, yang bekerja sama dengan setiap unit layanan pemerintah Kota Jakarta.

Selain praktik *smart governance* Jakarta, berikut beberapa artikel yang secara khusus praktik *smart governance* di kota lain. *Pertama*, Eniyati et al. (2017) menilai kesiapan Kota Pekalongan dalam *smart city* yang berfokus pada dimensi *Smart governance* yaitu mencakup empat kriteria utama: 1) keterlibatan masyarakat melalui pengambilan keputusan; 2) pelayanan sosial maupun publik; 3) Kejelasan terhadap manajerialnya; 3) perpolitikan dalam ranah strategi dan perspektifnya dimana penelitian ini menggunakan *mix method* dengan sebanyak 21 indikator indikator sebagai variabel input, *Smart governance* yang diturunkan ke dalam Indikator Operasional digunakan. Kurva bakunya berada di rentang 0-3 dan memiliki himpunan keanggotaan rendah, sedang, dan tinggi. Dengan menggunakan fungsi implikasi Min dan *defuzzifikasi centroid*, menemukan bahwa tingkat kesiapan Kota Pekalongan untuk menerapkan *Smart city* dari sudut pandang *Smart governance* adalah sedang.

*Kedua*, Realisasi tata kelola kota cerdas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikaji oleh Rahmatullah (2021) dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Berdasarkan Indikator *smart governance* yang dibangun Cohen Boyd, Tanjung Jabung Timur melalui pemerintahannya telah menerapkan tiga hal yang menjadi komponen utama: *pertama*, memungkinkan kebijakan penawaran dan permintaan (peran tiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat) bertemu. *Kedua*, transparansi dan akses data. Ketiga, ICT/e-gov (layanan pemerintah

dan masyarakat berbasis TI) melalui aplikasi Sabar *Smart Center* menampilkan tiga hubungan e-government: pemerintah dengan warga (G-to-C), pemerintah dengan bisnis (G-to-B), dan pemerintah dengan pemerintah.

*Ketiga*, Asmorowati et al. (2019) mengkaji *Smart governance* dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya. Lima kriteria yang menunjukkan *Smart governance*: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan: Proses E-Planning; 2) Pelayanan sosial maupun publik: Proses E-Procurement; 3) penataan tata kelola yang transparan: Dalam *E-Planning*, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan melalui *E-Musrenbang*, dan dalam *E-Procurement*, proses pelelangan; 4) Strategi dan perspektif politik: diwujudkan dalam seluruh proses GRMS karena seluruh sistem mengintegrasikan kegiatan birokrasi dari hulu (tingkat atas atau pengambil keputusan) ke hilir (masyarakat atau warga negara) untuk merepresentasikan pemerintahan daerah yang baik dan terutama pengelolaan keuangan daerah. GRMS dipercaya menjadikan pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan daerah di Surabaya menjadi mudah, efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Selain itu, terdapat beberapa studi komparasi beberapa daerah dalam konteks *smart governance* di Indonesia, yang diwakili oleh Anindra et al. (2018) yang menilai 15 kota cerdas di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sistem *E-Government*. Basis data berdasar dari data implementasi program kota pintar di Indonesia pada tahun 2017 yang menunjukkan bermasalah di 25 kota. Hasil kajian menunjukkan lebih dari 51% kota yang memiliki program tata kelola pemerintahan yang baik memiliki keberhasilan kota cerdas. Lebih lanjut, Anindra et al (2018) mencatat proyek kota pintar merupakan proyek yang terpisah-pisah, sehingga tidak ada integrasi. Pemerintah pusat atau kepala daerah biasanya memulai proyek ini, yang mempengaruhi keberlanjutannya. Jika kepentingan politik berubah, pergantian kepe-

mimpinan daerah akan menghentikan rencana besar proyek tersebut.

Penelitian Surya et al. (2021) mengkaji implementasi *Smart governance* melalui media sosial twitter pada pemerintah dengan indikator citra, kekritisannya, partisipasi, dan transparansi dengan data penggunaan Twitter yang dianalisis melalui NVivo 12 Plus menunjukkan Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Surabaya unggul dalam branding sektor kesehatan. Jawa Tengah, Kota Bandung, DKI Jakarta, dan Kota Surabaya merupakan daerah dengan krisis kesehatan tertinggi. DKI Jakarta terdepan dalam hal keterlibatan publik, sementara Surabaya, Bandung, dan Jawa Tengah terdepan dalam hal kolaborasi. DKI Jakarta, Kota Surabaya, Jawa Tengah, dan Kota Bandung unggul dalam hal transparansi layanan.

Kajian komparasi *smart governance* dalam menangani Covid-19 diwakili oleh Kawuriyan et al. (2022) di Kota Tangerang Selatan, Kota Yogyakarta, dan Surabaya—dengan penelitian kualitatif eksploratif ini mengkaji gagasan, kesiapan pemerintah (sumber daya manusia dan teknologi), dan implementasi COVID-19. Hasil kajian menunjukkan ketiga kota memiliki kesamaan dalam penyampaian informasi melalui situs web khusus untuk layanan dan informasi COVID-19. Ketiga kota tersebut secara aktif memberikan informasi mengenai COVID-19, dampak sosial dan ekonomi, protokol kesehatan, gaya hidup sehat, upaya pencegahan, penyebaran, dan pemulihan dampak COVID-19, yang terintegrasi dengan TIK. Namun, temuan dengan menganalisis media sosial Twitter menemukan bahwa pemerintah kota Yogyakarta lebih aktif dan dominan dalam merespons COVID-19 dibandingkan Kota Surabaya dan Tangerang Selatan.

## Catatan Kritis untuk Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Cerdas Indonesia

Pereira et al. (2018) mengingatkan kembali bahwa tata kelola cerdas, memungkinkan dan mengalokasikan kewenangan pengambilan keputusan, memberikan pemangku kepentingan (terutama warga) kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan produktif dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Peneliti juga merujuk konsep tata kelola pemerintahan cerdas sebagai mekanisme lintas sektoral untuk meningkatkan pembangunan perkotaan melalui intervensi negara yang efisien dan berkualitas tinggi dalam proses pengambilan keputusan (Barrionuevo et al., 2012). Untuk mengubah kota tradisional menjadi kota pintar membutuhkan lebih dari sekadar kemauan dari seluruh elemen *governance*. Terlebih, praktik dan struktur yang baik diperlukan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan ekosistem inovasi perkotaan. Hal ini disinggung Jiang et al. (2023) bahwa kecerdasan kota pintar yang sesungguhnya adalah mengembangkan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan konteks lokal untuk memecahkan masalah perkotaan.

Berdasarkan telaah praktik *smart governance* di beberapa kota di Indonesia dan Kota Amsterdam pada dua sub-bab di atas, dapat ditarik beberapa catatan penting yang merujuk pada praktik *smart governance* di Indonesia belum efektif. *Pertama*, di Indonesia, sistem kebijakan desentralisasi, otonomi daerah bahkan sistem perencanaan dan pembangunan nasional masih memiliki definisi yang berbeda tentang kota pintar, hal ini juga mempengaruhi ragam riset bertema *smart governance* yang berkembang saat ini—baik kuantitas maupun kualitas penelitian. Kenyataan ini sejalan dengan Offenhuber (2019) bahwa Platform *smart city* memungkinkan interaksi dan improvisasi namun dalam empirisnya, tidak ada platform kota pintar yang

sepenuhnya direncanakan dan ditentukan oleh aktor-aktor yang kuat, diimplementasikan dan diterapkan di domain pengguna. Hal ini juga direpresentasikan dari kesiapan maupun komponen *smart governance* berbeda satu kota dengan kota lainnya.

Apabila dikaitkan dengan kematangan *smart city* di Indonesia—tentu dapat ditunjukkan bahwa kota yang merupakan pioner dalam aksi *smart city*—misal dalam hal ini Kota Jakarta menjadi terdepan ketimbang kota-kota lainnya, sehingga substansi realisasi *smart governance* juga lebih diperhatikan. Meskipun demikian, kota-kota lain di Indonesia juga sudah mulai menerapkan *smart governance* dengan mempromosikan aplikasi dalam ranah *e-government*, sehingga terdapat usaha yang memperlihatkan bahwa pemerintah kota atau daerah mulai memprioritaskan pemerintahan yang efektif, efisien, dan komunikatif secara digital. Hal ini berarti juga usaha untuk meningkatkan kualitas birokrasi melalui inovasi dan teknologi yang terintegrasi. Pemerintahan yang cerdas memberikan transparansi dan layanan yang cepat kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

*Kedua*, persoalannya, keterlibatan masyarakat masih rendah dalam ranah tata kelola kota pintar. Rendahnya keterlibatan masyarakat memiliki linieritas dengan masih rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi yang dipakai dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, rendahnya sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi juga menjadi permasalahan di ranah sektor publik. Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam platform *smart governance* tidak dapat semata-mata diposisikan sebagai kelemahan laten, sebab perlu disadari bahwa sistem pengambilan keputusan maupun partisipasi publik dalam ruang luring selama ini juga lemah. *Catatan ketiga* adalah rendahnya keaktifan/kualitas/kuantitas penyebaran informasi baik melalui platform, melalui media sosial, maupun aplikasi lainnya milik sektor publik. Beberapa penelitian menemukan bahwa terdapat pemerintah kota yang pasif akan pemberian informasi publik, seperti pada saat pandemi Covid-19

sehingga kepercayaan publik menjadi simpang siur. sementara di sisi lain, substansi *e-government*.

Pengalaman *smart governance* Kota Amsterdam juga dapat memberikan masukan *smart governance* Indonesia, seperti merujuk pada Nesti (2020) dan Nesti & Graziano (2020), misalnya pertama, akuntabilitas di antara para pemangku kepentingan hanya dapat diperkuat dengan membuat hasil keputusan dari jejaring tata kelola diakses secara publik dan dengan memperkenalkan indikator untuk menilai hasil yang dicapai. Kedua, akuntabilitas politik dapat diperkuat melalui keterlibatan politisi yang dipilih secara lebih efektif dalam Dewan Kota—legislatif. *Ketiga*, akuntabilitas politik harus dipromosikan dengan cara pertanggungjawaban atas keputusan mereka kepada masyarakat umum dan memungkinkan warga negara untuk menentang keputusan yang ditetapkan—sehingga terjadi *check and balance*. Dalam program inisiatif *smart city* harus terdapat post untuk meningkatkan kapasitas pemerintah untuk berkomunikasi dengan warga dan harus menciptakan peluang untuk melibatkan warga individu baik dalam keputusan strategis dan dalam evaluasi inisiatif *smart city*. Pada akhirnya, seharusnya dalam *smart governance* wajib adanya proses inklusi prosedural dalam berbagai fase pengambilan keputusan, dalam hal kaitannya aktor yang kurang terorganisir (seperti gerakan sosial lokal) seharusnya digandeng dalam rangka meningkatkan legitimasi dan efektivitas '*smart city*'. Setelah akuntabilitas dikawal, seharusnya keran partisipasi masyarakat dibuka lebar dan memastikan adanya transparansi dalam dinamika *smart city*—termasuk penggunaan data-data pribadi yang terkadang bias kepentingan.

Perbedaan konteks negara maju dan berkembang menjadi tantangan bagi implementasi *smart governance* maupun *smart city*. Secara general, hal ini relevan dengan *review* Malek et al. (2021), bahwa (a) Indikator inklusi sosial sebagian besar diterima di negara-negara maju yang demokratis, pemahaman para pemimpin

tentang kewarganegaraan, pendelegasian kekuasaan pengambilan keputusan dalam praktik-praktik tata kelola pemerintahan, budaya partisipatif masyarakat, dan disiplin diri warga negara; (b) indikator-indikator tersebut mungkin belum dapat diterima di negara-negara yang baru muncul dan sedang berkembang; dan (c) dalam jangka panjang, indikator-indikator tersebut dapat menjelaskan kebangkitan pengorganisasian diri. Inklusi sosial dalam *smart governance* dan/atau *smart city* di Kota Amsterdam ditunjukkan dengan usaha mendukung pengembangan kota pintar yang “berpusat pada warga”, meskipun dalam *Operating Management System (OMS)* yang “berpusat pada warga,” warga tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam orientasi atau implementasi strategis.

Di sisi lain, perkembangan generasi kota pintar<sup>9</sup> dapat menjelaskan kesimpulan utama praktik *smart governance* yang diangkat dalam paper ini, yaitu meskipun *smart governance* Kota Amsterdam lebih *advance* ketimbang kota-kota di Indonesia, namun *smart governance* Amsterdam masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, seperti memastikan akuntabilitas publik maupun politik yang *real*, hubungan antar stakeholder maupun sistem kebijakan yang dikawal hingga substansi keterlibatan masyarakat berkualitas. Dengan demikian, sebagai pelaku *smart city*, kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan

---

9 Perkembangan terbaru revolusi *smart city*, merujuk Makiela et al (2022) yaitu Revolusi kota pintar dimulai dengan smart city 1.0, smart city 2.0, smart city 3.0 dan smart city 4.0. Smart City 1.0 ditandai dengan penyedia teknologi yang mempromosikan teknologi sebagai solusi manajemen kota terbaik dan menekankan bagaimana teknologi dapat meningkatkan kehidupan warga. Smart City 2.0 menggunakan teknologi yang terus berkembang untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan serta menyediakan layanan darurat yang cerdas. Smart City 3.0 menekankan pada keterlibatan masyarakat. Smart City 4.0 dikembangkan sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 untuk melatih wirausahawan dan inovator teknologi muda. Smart City 4.0 membantu para inovator muda, perusahaan rintisan, dan perusahaan teknologi dalam mengembangkan solusi terbaik untuk menjadikan kota lebih cerdas, lebih aman, dan lebih berkelanjutan dengan mengembangkan keterampilan untuk Revolusi Industri 4.0 dan mempercepat perkembangan teknologi.

beragam saat ini dan di masa depan—termasuk tantangan *smart governance* yang “berpusat pada warga”

Selain dari pengalaman *smart governance* di Amsterdam, realisasi *smart governance* dapat berhasil dengan mengoptimalkan komponen kebijakan *smart city* itu sendiri. peneliti sepakat bahwa banyak rekomendasi kebijakan *smart governance* yang dapat ditawarkan. Salah satunya kajian Tan dan Taeihagh (2019 yang menawarkan strategi-strategi kebijakan sebagai berikut: 1) Meningkatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar; 2) Meningkatkan pendapatan dan diversifikasi sumber pembiayaan untuk pengembangan *smart city* ; 3) Membangun kerangka peraturan untuk tata kelola *smart city*; 4) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan mempromosikan inklusi digital; 5) Menciptakan ekosistem yang mendukung yang memelihara start-up dan mendorong kemitraan publik-swasta yang adil; 6) Mendorong partisipasi aktif warga ; 7) Mempromosikan kelestarian lingkungan, sebagai bagian dari narasi kebijakan dalam pengembangan *smart city*.

## **Keterbatasan Penelitian**

Makalah ini merupakan studi terbatas dengan dukungan kertas kerja studi tentang tinjauan riset-riset *smart governance* di Amsterdam dan perkembangan riset sejenis di Indonesia—sebagian besar bersumber pada artikel jurnal yang diterbitkan hingga tahun 2023. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang baik mengenai praktik *smart governance* serta kemungkinan mengungkap kesenjangan penelitiannya. Peneliti berharap kajian ini memberikan masukan kepada pengambil kebijakan maupun pemerhati *smart governance* bahwa tata kelola yang cerdas mampu meningkatkan keberlanjutan kota (Giuliodori et al., 2023).

## Acknowledge

Paper ini berawal dari tugas akhir mata kuliah Pembangunan Smart City yang diselenggarakan MAP DMKP FISIPOL UGM tahun 2020 yang dikembangkan lagi pada tahun 2023 berdasarkan perkembangan literatur yang tersedia.

## Reference

- Alawadhi, S., A. Aldama-Nalda, H. Chourabi, R. J. Gil-Garcia, S. Leung, S. Mellouli, T. Nam, T. Pardo, H. J. Scholl, and S. Walker. (2012). *Building Understanding of Smart City Initiatives*. in *Electronic Government: Proceedings of the 11th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2012*, 7443, pp. 40–53.
- AlAwadhi, S., & Scholl, H. J. (2013). Aspirations and Realizations: The Smart City of Seattle, in *Proceedings of the 46th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-46)*, 0, pp. 1695–1703.
- AlAwadhi, S., & Scholl, H. J. (2016). Smart Governance: A Cross-Case Analysis of Smart city Initiatives, in *49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2016)*, pp. 2953–2963.
- Almirall, E., Wareham, J., Ratti, C., Conesa, P., Bria, F., Gaviria, A., & Edmondson, A. (2016). Smart Cities at the Crossroads: New Tensions in City Transformation. *California Management Review*, 59(1), 141-152.
- Alonso, R. G., & Lippez-De Castro, S. (2016). Technology helps, people make: A smart city governance framework grounded in deliberative democracy. In J. R. Gil-Garcia, T. A. Pardo, & T. Nam (Eds.), *Smarter as the new Urban Agenda* (pp. 333 – 347). Springer International.
- Anindra, F., Supangkat, S. H., & Kosala, R. R. (2018) Smart governance as Smart city Critical Success Factor (Case in 15 Cities in Indonesia), *Proceeding -2018 Int. Conf. ICT Smart Soc. Innov. Towar. Smart Soc. Soc. 5.0, ICISS 2018* [https://www.researchgate.net/publication/328601275\\_Smart\\_Governance\\_as\\_Smart\\_City\\_Critical\\_Success\\_Factor\\_Case\\_in\\_15\\_Cities\\_in\\_Indonesia/link/5c6eb2afa6fdcc360a74b4ba/download](https://www.researchgate.net/publication/328601275_Smart_Governance_as_Smart_City_Critical_Success_Factor_Case_in_15_Cities_in_Indonesia/link/5c6eb2afa6fdcc360a74b4ba/download)
- Anttiroiko, A. V., Valkama, P., & Bailey, S. J. (2014). Smart cities in the new service economy: building platforms for smart services. *AI & Society*, 29(3), 323-334.
- Amsterdam *Smart city* (2023, June 2023). Partners. *ASC online* diakses di <https://amsterdamsmartcity.com/partners> tanggal 5 Juni 2023
- Asmorowati, S., Setijaningrum, E., Suaedi, F., & Dewi, Y. F. (2019). Smart Governance in Public Financial Management: A Study of Government Resources Management System (GRMS) in the City of Surabaya. *IAPA Proceedings Conference*. <https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/view/249>

- Baron, G., Brinkman, J., & Wenzler, I. (2012). Supporting Sustainability through Smart Infrastructures: The Case for the City of Amsterdam. *International Journal of Critical Infrastructures* 8(2–3) 169–177. Doi:10.1504/IJCIS.2012.049036.148F.
- Barrionuevo, J. M., Berrone, P., & Ricart, J. E. (2012). Smart cities, sustainable progress. *IESE Insight*, 14(14), 50–57.
- Bevir, M. (2012). *Governance: A Very Short Introduction*. California: Oxford University Press.
- Bolivar, R. P. M., & Meijer, J. A. (2016). Smart governance: Using a literature review and empirical analysis to build a research model. *Social Science Computer Review*, 34(6), 673–692.
- Brown, W. (2015). *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Capdevila, I., & Zarlenga, M. I. (2015). Smart city or smart citizens? The Barcelona case. *Journal of strategy and management*, 8(3), 266–282.
- Capra, C. F. (2016). The smart city and its citizens: Governance and citizen participation in Amsterdam smart city. *International Journal of E-Planning Research*, 5(1), 20–38.
- Caragliu, A. C. Del Bo, P. Nijkamp. (2011). Smart Cities in Europe. *J. Urban Technol.* 18, pp.65–82.
- Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T.A., Scholl, H.J. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. In: *IEEE 45th Hawaii International Conference on System Sciences*, doi:10.1109/hicss.2012.615.
- Colldahl, C., & Kelemen, J. E. (2013). Smart Cities: Strategic Sustainable Development for an Urban World. *Thesis Master. Karlskrona, Sweden: School of Engineering Blekinge Institute of Technology*.
- Camboim, G.F., Pufal, N.A., Barbieux, D., & Zawislak, P.A. (2022). The Role of Dedicated Organizations in The Governance of Smart city Development: A Multiple Case Study. *2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference*, 1-9.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Meijers, E., & Pichler-Milanović, N. (2007). *Ranking of European Medium-sized Cities*. Vienna: Final Report.
- Giuliodori, A., Berrone, P., & Ricart, J.E. (2023). Where smart meets sustainability: The role of Smart governance in achieving the Sustainable Development Goals in cities. *Business Research Quarterly*, 26(1) 27–44
- Demirel, D. & Mülazımoğlu, M. E. (2022). How the smart governance model shapes cities? Cases from Europe. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 16(1), 8-25.
- Dumay, J. (2016). A critical reflection on the future of intellectual capital: from reporting to disclosure. *J. Intellect. Cap.* 17 (1), 168e184.
- Eniyati, S., Santi, R. C. N., Retnowati, R., Mulyani, S., & Martha, K. (2017). Perhitun-

- gan tingkat kesiapan implementasi smart city dalam perspektif smart governance dengan metode fis mamdani. *Jurnal DINAMIK* 22(1):39-48.
- Firmansyah, Y., Alicia, F., Restika, C., & Luthfia, N. A. (2022). Application of Sound Governance in Realizing Smart City through JSCLAB in DKI Jakarta. *In ICCD 4(1)* pp 435-442.
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. London: Macmillan.
- Jameson, Shazade, Christine Richter & Linnet Taylor. (2019). People's strategies for perceived surveillance in Amsterdam Smart city. *Urban Geography*, 40(10), 1467-1484, Doi: 10.1080/02723638.2019.1614369
- Jiang, H., Geertman, S.C., & Witte, P.A. (2023). The contextualization of smart city technologies: An international comparison. *Journal of Urban Management*, 12, 33-43
- Lee, J., Babcock, J., Pham, T.S., Bui, T.H., & Kang, M. (2023). Smart city as a social transition towards inclusive development through technology: a tale of four smart cities. *International Journal of Urban Sciences*, 27, 75 - 100.
- Kawuriyan, M. W., Sadayi, D. P., Purnomo, E. P., & Fathani, A. T. (2022). Comparison of Smart Governance in Response to Handling COVID-19 (Case Study: South Tangerang City, Yogyakarta City, Surabaya City). *Webology*, 19(1).
- Kurnia, T. (2020). Akselerasi Pembangunan Jakarta Smart City. *Reka Ruang* 3(1), 27-35.
- Makieła, Z. J., Stuss, M. M., Mucha-Kuś, K., Kinelski, G., Budziński, M., & Michatek, J. (2022). Smart city 4.0: Sustainable Urban Development in the Metropolis GZM. *Sustainability*, 14(6), 3516.
- Malek, J.A., Lim, S., & Yigitcanlar, T. (2020). Social Inclusion Indicators for Building Citizen-Centric Smart Cities: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 13(1), 376. Doi: 10.3390/su13010376
- Mancebo, F. (2020). Smart city strategies: Time to involve people. Comparing Amsterdam, Barcelona and Paris. *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*, 13(2), 133-152.
- Meijer, A., Bolívar, M.P.R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *Int. Rev. Adm. Sci.*, 82 (2), 392e408.
- Meijer, A.J., Gil-Garcia, J.R., Bolívar, M.P.R. (2016). Smart city research: contextual conditions, governance models, and public value assessment. *Soc. Sci. Comput. Rev.* 34 (6), 647e656.
- Nam T and Pardo TA. (2011a). Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context. *In: Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*. pp. 185-194.
- Nam T and Pardo TA. (2011b). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. *in 12th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2011)*, pp. 282-291.
- Nesti, G. (2020). Defining and assessing the transformational nature of smart city

- governance: insights from four European cases, *International Review of Administrative Sciences*, 86(1) 20–37.
- Nesti, G & Graziano, P. R. (2020). The democratic anchorage of governance networks in smart cities: an empirical assessment. *Public Management Review*, 22(5), 648-667, Doi: 10.1080/14719037.2019.1588355.
- Noori, N., Hoppe, T., & de Jong, M. (2020). Classifying pathways for smart city development: Comparing design, governance and implementation in Amsterdam, Barcelona, Dubai, and Abu Dhabi. *Sustainability*, 12(10), 4030.
- Offenhuber, D. (2019). The platform and the bricoleur—Improvisation and smart city initiatives in Indonesia. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 46, 1565 - 1580.
- Pereira, G. V., Cunha, M. A., Lampoltshammer, T. J., Parycek, P., & Testa, M. G. (2017). Increasing Collaboration and participation in smart city governance: A cross-case analysis of smart city initiatives. *Information Technology for Development*, 23(3), 526–553.
- Pierre, J. (1999). Models of urban governance: The institutional dimension of urban politics. *Urban Affairs Review* 34(3), 372–396.
- Pierre, J. (2011). *The Politics of Urban Governance*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Pereira, G.V.; Parycek, P.; Falco, E.; Kleinhans, R. (2018) Smart governance in the context of smart cities: A literature review. *Inf. Polity*, 23, 143–162.
- Praharaj, S., J.H. Han, S. Hawken, (2018). Towards the right model of smart city governance in India. *Int. J. Sust. Dev. Planning* 13(2), 171–186.
- Pratama, Arif Budy. (2021). Smart is not Equal to Technology: An Interview With Suhono Harso Suapngkat on the Emergence and Development of Smart Cities in Indonesia. *ASEAS* 15(1) 125-132.
- Purba, Y. D. A., & Jayadi, R. (2023). A Study on the Implementation of the Smart city Concept in Indonesia, Study on the Capital City of Jakarta. *Journal on Education*, 5(4), 15689-15702.
- Putra, Z. D. W. & Gm van der Knaap, W. (2018). Urban innovation system and the role of an open web-based platform: The case of Amsterdam smart city. *Journal of Regional and City Planning*, 29(3), 234–249.
- Putra, Z. D. W. & Wim van der Knaap. (2019). A smart city needs more than just technology: Amsterdam's Energy Atlas project. *Smart City Emergence*. Doi:10.1016/B978-0-12-816169-2.00006-7
- Rachmawati, R., Anjani, D.F., Rohmah, A., Nurwidiani, T., & Almasari, H. (2022). Electronically-based governance system for public services: implementation in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *Human Geographies-Journal of Studies and Research in Human Geography* 16(1), 73-86.
- Rahmatullah, A.F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep *Smart governance* dalam paradigma Smart city di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *ijd-demos*, 3(2) 86-97.
- Raven, R., Sengers, F., Spaeth, P., Xie, L., Cheshmehzangi, A., & de Jong, M. (2019).

- Urban experimentation and institutional arrangements. *European Planning Studies*, 27(2), 258–281.
- Rose, M. F. (2022). Activity types, thematic domains, and stakeholder constellations: explaining civil society involvement in Amsterdam's smart city. *European Planning Studies*, 30(6), 975 - 993.
- Rose, F. M., Thiel, J., & Grabher, G. (2022). Selective inclusion: Civil society involvement in the *smart city* ecology of Amsterdam. *European Urban and Regional Studies*, 29, 369 - 382.
- Rosandya, R. (2017, June 26). Langkah Menuju "100 Smart city" Neraca online diakses <https://www.neraca.co.id/article/93533/langkah-menuju-100-smart-city> tanggal 26 Juni 2023.
- Scholl, H. J., & Scholl, M. C. (2014). Smart governance: A Roadmap for Research and Practice. *In iConference 2014 Proceedings* (p. 163–176). doi:10.9776/14060
- Schrammeijer, E. A., van Zanten, B. T., & Verburg, P. H. (2021). Whose park? Crowdsourcing citizen's urban green space preferences to inform needs-based management decisions. *Sustainable Cities and Society*, 74, Article 103249.
- Surya, I., Nurmiyati, N., Suranto., Hasanah, N. (2021). Analysis of The Implementation of Smart governance through Twitter in Local Governments in Indonesia. *Public Administration Journal* 11(2): 169-184.
- Syalianda, Salsabila I & Kusumastuti, Ratih D. (2021). Implementation of Smart city Concept: A Casr of Jakarta Smart city, Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 716 (2021) 0123128
- Tan, Si Ying and Araz Taeihagh. (2020). Smart city Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 12, 899; doi:10.3390/su12030899.
- Tomor, Z., Meijer, A.J., Michels, A., & Geertman, S.C. (2019). Smart Governance for Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review. *Journal of Urban Technology*, 26, 27 - 3.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2018). *The World's Cities in 2018—Data Booklet (ST/ESA/SER.A/417)*.
- Van Winden, W., Oskam, I., Van Den Buuse, D., Schrama, W., Van Dijck, E.J. (2016). *Organizing Smart city Projects: Lessons from Amsterdam*. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdams.
- Visnjic, I., Neely, A., Cennamo, C., & Visnjic, N. (2016). Governing the City: Unleashing Value from the Business Ecosystem. *California Management Review*, 59(1), 109-140.
- Voorwinden, A. (2022). Regulating the Smart City in European Municipalities: A Case Study of Amsterdam. *European Public Law*, 28(1), 155-180. Doi:10.54648/euro2022008
- Winden, W. van. (2016). Smart city pilot projects, scaling up or fading out? Experiences from Amsterdam. *Paper presented at Regional*

*Studies Association Annual Conference, Graz, Austria.*

Yoo, Y. (2021). Toward Sustainable Governance: Strategic Analysis of the Smart city Seoul Portal in Korea. *Sustainability, 13*, 5886. Doi: 10.3390/su13115886



### **Institute of Governance and Public Affairs (IGPA)**

adalah institusi yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan penelitian serta melakukan diseminasi dan publikasi hasil penelitian di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada. IGPA merupakan upaya revitalisasi kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan MAP UGM yang berdiri sejak 1994.

Persoalan mengenai studi maupun pengembangan sektor publik di Indonesia dalam era kontemporer menghadapi berbagai tantangan dan problem yang tidak sederhana. Rendahnya kualitas kebijakan publik, lemahnya kapasitas aparat publik, belum efektifnya kinerja organisasi publik, tantangan mewujudkan good governance, maupun kebutuhan untuk penguatan citizenship, jelas membutuhkan jawab dan solusi yang efektif sekaligus komprehensif. Oleh karena itu, IGPA didirikan dan dikembangkan dengan fokus melakukan analisis dinamika organisasi sektor public, citizenship dan governance di Indonesia. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, IGPA diharapkan mampu menghasilkan berbagai penelitian yang berkualitas untuk dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder kebijakan publik.



# DIVISI DIKLAT DAN PENDAMPINGAN

Divisi Diklat dan Pendampingan merupakan penyelenggara pelatihan perencanaan bagi aparatur pemerintah (pusat maupun daerah), BUMN, pegiat isu kebijakan publik dan umum serta melaksanakan pendampingan bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan kajian.

## PELATIHAN NON GELAR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), baik di tingkat pusat maupun di provinsi/ kabupaten/ kota. Dalam upaya efektifitas pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tersebut, Pusbindiklatren bekerjasama dengan MAP Fisipol UGM. Pelatihan yang dilaksanakan di MAP Fisipol UGM terdiri dari JFP Pertama, Muda, Madya Sosial, PPD RPJMD dan pelatihan substansi lainnya.

## PELATIHAN MANDIRI

Pelatihan Mandiri Reguler didesain dua hari untuk meningkatkan kapasitas ASN maupun pegiat isu publik dengan menghadirkan para pembicara yang expert di bidangnya.

### ● Tema yang ditawarkan:

- ▷ Indikator Kinerja Untuk Perencanaan dan Akuntabilitas;
- ▷ Penyusunan Proses Bisnis dan SOP;
- ▷ Penyusunan RPJMD Teknokratik;
- ▷ Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ▷ Desain dan Inovasi Pelayanan Publik;
- ▷ Penyusunan Policy Brief;
- ▷ Analisis Kebijakan Publik;
- ▷ Data Analitik Untuk Instansi Pemerintah;
- ▷ dan tema lainnya terkait perencanaan kebijakan, kepegawaian, manajemen dll.

Pendaftaran: [ugm.id/daftarpelatihan](http://ugm.id/daftarpelatihan)

## PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI

MAP Fisipol UGM memfasilitasi instansi baik daerah maupun pusat untuk pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kajian lainnya.

08112543288 (Gery)



082221790833 (Dina)



[diklatmap@ugm.ac.id](mailto:diklatmap@ugm.ac.id)



[www.map.ugm.ac.id/diklat](http://www.map.ugm.ac.id/diklat)



Diklat MAP UGM





# PERSYARATAN PENDAFTARAN PROGRAM STUDI S2/S3 IAP:

1. Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang sah dan legal;
2. Transkrip jenjang pendidikan sebelumnya yang sah dan legal;
3. Sertifikat/bukti akreditasi program studi jenjang pendidikan yang terakhir;
4. Sertifikat TPA yang masih berlaku;
5. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku;
6. Rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen/atasan langsung (bagi yang sudah bekerja);
7. Proyeksi keinginan;
8. Surat Ijin (bagi yang sudah bekerja);
9. MoU/PKS/Surat Penetapan sebagai penerima beasiswa (khusus pelamar jalur kerjasama);
10. Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.

## Syarat Khusus S2:

1. Esai dengan topik Administrasi Publik Kontemporer dapat dikaitkan dengan kebijakan publik atau manajemen publik sebanyak 2000 kata;
2. CV Lengkap;
3. Tes Wawancara.

## Syarat Khusus S3:

1. Proposal Penelitian 3000 kata;
2. CV Lengkap;
3. Tes Wawancara.

 **Informasi**   
**Pendaftaran**

<http://um.ugm.ac.id>